



KAB. MAJALENGKA



PERUBAHAN RENCANA KERJA

2024



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JL.Ahmad Kusumah No. 58 Telp/Fax (0233) 281608
Majalengka 45411

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah- Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

Adapun tujuan dari pembuatan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini adalah sebagai bentuk penyusunan perencanaan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja ini tersusun berkat kerja sama serta rasa tanggungjawab yang tinggi dari semua unsur, mulai dari unit terendah sampai ke pucuk pimpinan. Semua ini tidak lain merupakan bentuk perwujudan dari adanya kebersamaan, kekompakan, semangat serta rasa tanggung jawab yang tinggi selaku aparat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Renja ini jauh dari sempurna. Walau demikian kami tetap berhadap semoga laporan ini ada guna serta manfaatnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan pemikiran dan masukan dalam penyusunan Renja ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Aamiin.

Majalengka, Agustus 2024

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka

ANDIK SUJARWO A.P.,M.P.

Pembina Tk. I

NIP. 19730918 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)	
PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN	
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2022.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMD	26
3.3. Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	31
BAB V PENUTUP	35
5.1. Kesimpulan.....	35
5.2. Rekomendasi	36
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka	11
Tabel 2.2 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka	16
Tabel 2.3. Rekapitulasi Status Desa Mandiri Tahun 2024	16
Tabel 3.1. Sasaran dan Indikator Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026	28
Tabel 3.2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024	30
Tabel 4.1. Rekapitulasi Renja Per Bidang Urusan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024	31

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan *stakeholders* di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, perangkat daerah sebagai *stakeholders* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja perangkat daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja perangkat daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja perangkat daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja perangkat daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat.

Sebagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten Majalengka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan kelembagaan, sosial budaya, usaha ekonomi, teknologi tepat guna, dan pemerintahan desa, maka saat ini dihadapkan dengan beberapa hal yang harus menjadi perhatian utama dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta mengabil solusi guna penyelesaian permasalahan terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Seiring dengan hal itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan dalam pasal 12 ayat 2, menandakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, diantaranya berkaitan dengan *leading sector* DPMD yaitu meliputi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Selain itu tuntutan penyelarasan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menuntut DPMD untuk dapat mendorong terwujudnya desa mandiri terutama kemampuan pemerintahan desa dan masyarakat agar dapat memberdayakan modal sosial dan sumber daya lainnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dibuat setiap tahun, selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja DPMD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2024.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja

yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Renja DPMD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 11);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2012 Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 23. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
 24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;

25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 17);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dihasilkannya dokumen Perubahan Rencana Kerja tahunan yang menjamin adanya korelasi atau sinergi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan dan arah kebijakan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Dirumuskannya dokumen Perubahan Rencana Kerja bagi seluruh pegawai DPMD Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mengevaluasi, menganalisis kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan evaluasi tahun berjalan sebagai bahan acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD selama tahun lalu.
2. Mengarahkan Program dan Kegiatan sesuai Visi, Misi Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.
3. Sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
4. Mengakomodasi usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sesuai dengan tupoksi DPMD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Evaluasi Renja DPMD Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun 2024 hingga Triwulan II. Selanjutnya dikaitkan pula dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, serta capaian lainnya terkait Indikator Kinerja maupun indikator terkait lainnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan PD dalam pencapaian pembangunan kabupaten.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan perbandingan program dan kegiatan dari sebelum dan sesudah perubahan pada Perangkat Daerah tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang di simpulkan yang perlu mendapat perhatian, dalam rangka pelaksanaan program kegiatan serta rekomendasi untuk menyempurnakan program kegiatan yang akan datang.

BAB II**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024****2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan
Triwulan II Tahun 2024**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 mencakup Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Penataan Desa; 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa; 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat.

Indikator sasaran strategis merupakan ukuran kondisi yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya suatu kegiatan sehingga pencapaian target indikator sasaran strategis merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dari sebanyak 5 (lima) program yang terurai menjadi 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub-kegiatan. Perjalanan di tahun 2024 sampai dengan Triwulan ke-II, diperoleh hasil pengukuran rata-rata tingkat capaian kinerja dan rata-rata pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka telah terukur secara nyata. Hasil pencapaian kinerja fisik sampai akhir Triwulan II tahun 2024 mencapai yaitu 27.65% . Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran

terhadap tingkat capaian (realisasi) indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), dan *outcome* (hasil) dari seluruh kegiatan.

Secara umum pengukuran terhadap rata-rata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sampai dengan triwulan II , realisasi keuangan Rp.5.930.100.605,00 (27.65%), dari total pagu Rp. 21.443.927.693,00 yang merupakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Majalengka, Pajak Rokok dan Batuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Program dan kegiatan yang menunjang capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 tertuang pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGKA

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2024 (%)					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100					
1	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																												
2	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		2.322,00	18.733.089.800	0,00	0	2.322,00	21.443.927.893	87,00	3.032.963.373	606,00	2.897.137.232	0,00	0	0,00	0	693,00	5.930.100.605	26,61	26	693,00	5.930.100.605	26,61	26				
3	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		224,00	5.026.879.600	0,00	0	224,00	5.694.275.139	6,00	993.095.285	114,00	1.446.776.176	0,00	0	0,00	0	120,00	2.439.871.461	52,04	47	120,00	2.439.871.461	52,04	48				
4	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31,00	79.999.900	0,00	0	31,00	79.999.900	0,00	0	14,00	29.700.000	0,00	0	0,00	0	14,00	29.700.000	35,34	34	14,00	29.700.000	35,34	34				
5	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	14.999.900	0,00	0	2,00	14.999.900	0,00	0	1,00	9.000.000	0,00	0	0,00	0	1,00	9.000.000	50,00	60	1,00	9.000.000	50,00	60				
6	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1,00	12.000.000	0,00	0	1,00	12.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0				
7	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1,00	6.000.000	0,00	0	1,00	6.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0				
8	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1,00	6.000.000	0,00	0	1,00	6.000.000	0,00	0	1,00	6.000.000	0,00	0	0,00	0	1,00	6.000.000	100,00	100	1,00	6.000.000	100,00	100				
9	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1,00	6.000.000	0,00	0	1,00	6.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0				
10	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,00	20.000.000	0,00	0	19,00	20.000.000	0,00	0	9,00	10.500.000	0,00	0	0,00	0	9,00	10.500.000	47,37	53	9,00	10.500.000	47,37	53				
11	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,00	15.000.000	0,00	0	6,00	15.000.000	0,00	0	3,00	4.200.000	0,00	0	0,00	0	3,00	4.200.000	50,00	28	3,00	4.200.000	50,00	28				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				35,34	34								
12	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		29,00	4.183.766.800	0,00	0	29,00	4.693.452.739	3,00	960.740.285	9,00	1.136.414.065	0,00	0	0,00	0	12,00	2.117.154.370	60,42	55	12,00	2.117.154.370	60,42	57				
13	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12,00	4.175.707.000	0,00	0	12,00	4.685.452.939	3,00	960.740.285	3,00	1.132.114.065	0,00	0	0,00	0	6,00	2.112.854.370	50,00	45	6,00	2.112.854.370	50,00	51				
14	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	3.300.000	0,00	0	1,00	3.300.000	0,00	0	1,00	3.300.000	0,00	0	0,00	0	1,00	3.300.000	100,00	100	1,00	3.300.000	100,00	100				
15	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16,00	4.699.800	0,00	0	16,00	4.699.800	0,00	0	5,00	1.000.000	0,00	0	0,00	0	5,00	1.000.000	31,25	21	5,00	1.000.000	31,25	21				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				60,42	55								
16	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		40,00	25.000.000	0,00	0	40,00	25.000.000	0,00	0	40,00	25.000.000	0,00	0	0,00	0	40,00	25.000.000	100,00	100	40,00	25.000.000	100,00	100				



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6+12	15 = 14/5*100											
1	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		2.322,00	18.733.089.800	0,00	0	2.322,00	21.443.927.693	87,00	3.032.963.373	606,00	2.897.137.232	0,00	0	0,00	0	693,00	5.930.100.605	26,61	26	693,00	5.930.100.605	26,61	26
3	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		224,00	5.026.879.600	0,00	0	224,00	5.694.275.139	6,00	993.095.285	114,00	1.446.776.176	0,00	0	0,00	0	128,00	2.439.871.461	52,64	47	120,00	2.439.871.461	52,64	48
4	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31,00	79.999.900	0,00	0	31,00	79.999.900	0,00	0	14,00	29.700.000	0,00	0	0,00	0	14,00	29.700.000	35,34	34	14,00	29.700.000	35,34	34
5	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	14.999.900	0,00	0	2,00	14.999.900	0,00	0	1,00	9.000.000	0,00	0	0,00	0	1,00	9.000.000	50,00	60	1,00	9.000.000	50,00	60
6	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00	12.000.000	0,00	0	1,00	12.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	6.000.000	0,00	0	1,00	6.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00	6.000.000	0,00	0	1,00	6.000.000	0,00	0	1,00	6.000.000	0,00	0	0,00	0	1,00	6.000.000	100,00	100	1,00	6.000.000	100,00	100
9	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00	6.000.000	0,00	0	1,00	6.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Berkas Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Berkas Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Berkas Realisasi Kinerja SKPD	19,00	20.000.000	0,00	0	19,00	20.000.000	0,00	0	9,00	10.500.000	0,00	0	0,00	0	9,00	10.500.000	47,37	53	9,00	10.500.000	47,37	53
11	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,00	15.000.000	0,00	0	6,00	15.000.000	0,00	0	3,00	4.200.000	0,00	0	0,00	0	3,00	4.200.000	50,00	28	3,00	4.200.000	50,00	28
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													35,34	34											
12	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		29,00	4.183.706.800	0,00	0	29,00	4.693.452.739	3,00	960.740.285	9,00	1.136.414.085	0,00	0	0,00	0	12,00	2.117.154.370	60,42	55	12,00	2.117.154.370	60,42	57
13	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12,00	4.175.707.000	0,00	0	12,00	4.685.452.909	3,00	960.740.285	3,00	1.132.114.085	0,00	0	0,00	0	6,00	2.112.854.370	50,00	45	6,00	2.112.854.370	50,00	51
14	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	3.300.000	0,00	0	1,00	3.300.000	0,00	0	1,00	3.300.000	0,00	0	0,00	0	1,00	3.300.000	100,00	100	1,00	3.300.000	100,00	100
15	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16,00	4.699.800	0,00	0	16,00	4.699.800	0,00	0	5,00	1.000.000	0,00	0	0,00	0	5,00	1.000.000	31,25	21	5,00	1.000.000	31,25	21
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													60,42	55											
16	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		40,00	25.000.000	0,00	0	40,00	25.000.000	0,00	0	40,00	25.000.000	0,00	0	0,00	0	40,00	25.000.000	100,00	100	40,00	25.000.000	100,00	100



No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra/Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
17	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40,00	25.000.000	0,00	0	40,00	25.000.000	0,00	0	40,00	25.000.000	0,00	0	0,00	0	40,00	25.000.000	100,00	100	40,00	25.000.000	100,00	100
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			100,00	100					
18	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		84,00	389.424.300	0,00	0	84,00	337.024.900	3,00	12.355.000	33,00	105.193.800	0,00	0	0,00	0	36,00	117.548.800	42,86	38	36,00	117.548.800	42,86	36
19	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12,00	23.785.000	0,00	0	12,00	23.785.000	0,00	0	6,00	11.890.000	0,00	0	0,00	0	6,00	11.890.000	50,00	50	6,00	11.890.000	50,00	50
20	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12,00	76.500.000	0,00	0	12,00	74.100.000	3,00	12.355.000	3,00	23.965.000	0,00	0	0,00	0	6,00	36.320.000	50,00	49	6,00	36.320.000	50,00	47
21	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12,00	9.150.000	0,00	0	12,00	9.150.000	0,00	0	6,00	4.560.000	0,00	0	0,00	0	6,00	4.560.000	50,00	50	6,00	4.560.000	50,00	50
22	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12,00	84.990.000	0,00	0	12,00	84.990.000	0,00	0	3,00	9.880.000	0,00	0	0,00	0	3,00	9.880.000	25,00	12	3,00	9.880.000	25,00	12
23	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12,00	19.999.900	0,00	0	12,00	19.999.900	0,00	0	6,00	9.969.800	0,00	0	0,00	0	6,00	9.969.800	50,00	50	6,00	9.969.800	50,00	50
24	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perakitan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perakitan Perundang-undangan yang disediakan	12,00	25.000.000	0,00	0	12,00	25.000.000	0,00	0	3,00	4.476.000	0,00	0	0,00	0	3,00	4.476.000	25,00	18	3,00	4.476.000	25,00	18
25	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	150.000.000	0,00	0	12,00	100.000.000	0,00	0	6,00	40.453.000	0,00	0	0,00	0	6,00	40.453.000	50,00	40	6,00	40.453.000	50,00	27
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			42,86	38					
26	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak dan Pemeliharaan Daerah		24,00	323.748.000	0,00	0	24,00	323.748.000	0,00	0	11,00	137.221.391	0,00	0	0,00	0	11,00	137.221.391	45,83	42	11,00	137.221.391	45,83	42
27	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	139.200.000	0,00	0	12,00	139.200.000	0,00	0	5,00	52.045.391	0,00	0	0,00	0	5,00	52.045.391	41,67	37	5,00	52.045.391	41,67	37
28	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	184.548.000	0,00	0	12,00	184.548.000	0,00	0	6,00	85.176.000	0,00	0	0,00	0	6,00	85.176.000	50,00	46	6,00	85.176.000	50,00	46
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			45,83	42					
29	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Sarang Misk Daerah Pemungutan Pajak dan Pemeliharaan Daerah		16,00	25.000.000	0,00	0	16,00	235.049.600	0,00	0	7,00	13.246.900	0,00	0	0,00	0	7,00	13.246.900	27,78	14	7,00	13.246.900	27,78	17
30	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak Perizinannya	3,00	0	0,00	0	3,00	2.400.000	0,00	0	1,00	836.900	0,00	0	0,00	0	1,00	836.900	33,33	35	1,00	836.900	33,33	0
31	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12,00	25.000.000	0,00	0	12,00	182.649.600	0,00	0	6,00	12.410.000	0,00	0	0,00	0	6,00	12.410.000	50,00	7	6,00	12.410.000	50,00	50
32	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	0	0,00	0	1,00	50.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			27,78	14					
33	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA		19,00	3.810.000.000	0,00	0	19,00	3.810.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Pemukiman Desa		19,00	3.810.000.000	0,00	0	19,00	3.810.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
35	2.13.02.2.01.0006	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	19,00	3.810.000.000	0,00	0	19,00	3.810.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			0,00	0					
36	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		5,00	3.150.000.000	0,00	0	5,00	2.791.453.315	1,00	1.037.294.420	1,00	90.250.000	0,00	0	0,00	0	2,00	1.127.544.420	40,00	40	2,00	1.127.544.420	40,00	36



No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra/Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
37	2.13.03.2.01	Facilitasi Kerja Sama antar Desa		5,00	3.150.000.000	0,00	0	5,00	2.791.453.315	1,00	1.037.294.420	1,00	90.250.000	0,00	0	0,00	0	2,00	1.127.544.420	40,00	40	2,00	1.127.544.420	40,00	36
38	2.13.03.2.01.0002	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5,00	3.150.000.000	0,00	0	5,00	2.791.453.315	1,00	1.037.294.420	1,00	90.250.000	0,00	0	0,00	0	2,00	1.127.544.420	40,00	40	2,00	1.127.544.420	40,00	36
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				40,00	40				
39	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		1.650,00	4.646.210.200	0,00	0	1.650,00	4.730.560.400	80,00	1.002.573.668	405,00	1.227.689.256	0,00	0	0,00	0	485,00	2.236.262.724	29,39	32	485,00	2.236.262.724	29,39	38
40	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1.650,00	4.646.210.200	0,00	0	1.650,00	4.730.560.400	80,00	1.002.573.668	405,00	1.227.689.256	0,00	0	0,00	0	485,00	2.236.262.724	29,39	32	485,00	2.236.262.724	29,39	38
41	2.13.04.2.01.0001	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	330,00	148.600.400	0,00	0	330,00	148.600.400	0,00	0	80,00	56.861.800	0,00	0	0,00	0	80,00	56.861.800	24,24	38	80,00	56.861.800	24,24	38
42	2.13.04.2.01.0004	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	330,00	4.126.710.000	0,00	0	330,00	4.051.440.000	80,00	1.002.573.668	80,00	1.016.337.256	0,00	0	0,00	0	160,00	2.018.910.924	48,48	50	160,00	2.018.910.924	48,48	49
43	2.13.04.2.01.0006	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	330,00	150.000.000	0,00	0	330,00	150.000.000	0,00	0	80,00	14.170.000	0,00	0	0,00	0	80,00	14.170.000	24,24	9	80,00	14.170.000	24,24	9
44	2.13.04.2.01.0013	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	330,00	70.899.800	0,00	0	330,00	155.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45	2.13.04.2.01.0018	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	330,00	150.000.000	0,00	0	330,00	225.270.000	0,00	0	165,00	140.320.000	0,00	0	0,00	0	165,00	140.320.000	50,00	62	165,00	140.320.000	50,00	94
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				29,39	32				
46	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		424,00	2.100.000.000	0,00	0	424,00	4.417.638.839	0,00	0	86,00	132.422.000	0,00	0	0,00	0	86,00	132.422.000	11,62	9	86,00	132.422.000	11,62	9
47	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		424,00	2.100.000.000	0,00	0	424,00	4.417.638.839	0,00	0	86,00	132.422.000	0,00	0	0,00	0	86,00	132.422.000	11,62	9	86,00	132.422.000	11,62	9
48	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	26,00	100.000.000	0,00	0	26,00	100.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
49	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	26,00	700.000.000	0,00	0	26,00	3.196.912.182	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
50	2.13.05.2.01.0006	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3,00	100.000.000	0,00	0	3,00	100.000.000	0,00	0	1,00	29.075.000	0,00	0	0,00	0	1,00	29.075.000	33,33	29	1,00	29.075.000	33,33	29
51	2.13.05.2.01.0007	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	26,00	600.000.000	0,00	0	26,00	420.726.657	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
52	2.13.05.2.01.0009	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	343,00	600.000.000	0,00	0	343,00	600.000.000	0,00	0	85,00	103.347.000	0,00	0	0,00	0	85,00	103.347.000	24,78	17	85,00	103.347.000	24,78	17

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah aid tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah aid tahun 2024 (%)	
										I		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		11,62	9						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						0,00	0	2.322,00	21.443.927.693	87,00	3.032.963.373	606,00	2.897.137.232	0,00	0	0,00	0	693,00	5.930.100.605	26,61	26	693,00	5.930.100.605	26,61	26

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Meningkatkan kualitas lingkungan desa dengan mengembangkan potensi desa. Kondisi ini dapat dicapai dengan salah satu upaya pelaksanaan lomba desa dan juga terdistribusikannya bantuan keuangan desa serta pelaksanaan percepatan pembangunan desa

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : masih terjadi bongkar pasang aparat desa sehingga perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : konsisten salami memberikan sosialisasi dan pembinaan serta memberikan bantuan sarana prasarana untuk peningkatan desa

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya : akan lebih memprioritaskan kegiatan untuk pembangunan desa yang merata di berbagai sektor dan pelaksanaan pekerjaan yang tepat waktu

Majalengka, 02 Juli 2024

Dievaluasi,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ANDIK SUJARWO, A.P.,M.P.

NIP.19730918199311 1 001

Majalengka, 2024

Dievaluasi,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Drs. H. YAYAN SUMANTRI, M.Si.

NIP. 19670724 198603 1 002

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka s/d Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

Tabel 2.2
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka

No	Sasaran	Indikator			
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase desa mandiri	Persen	55.15	53.03

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka sasaran meningkatnya kemandirian desa dengan indikator persentase desa mandiri adalah sebesar 53.03% atau sebesar 176 Desa dengan realisasi capaian kinerja 96,16 %. Realisasi capaian ini didukung oleh Program Penataan Desa , Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ,Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka dapat di ilustrasikan pada tabel 2.3. (Terlampir).

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adanya perubahan payung hukum tentang anggaran, dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya di tindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sekaitan dengan hal tersebut isu-isu strategis tersebut merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis yang menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Majalengka di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melalui kewenangan DPMD, yaitu:

1. Masih rendahnya daya saing masyarakat desa;
2. Kurang begitu diperhatikannya pembangunan di wilayah pedesaan;
3. Masih kurangnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dalam mengelola administrasi desa, baik di bidang keuangan, perencanaan dan pelaksanaan program maupun kegiatan lainnya;
4. Kurang optimal dalam pendistribusi dana pembangunan desa;
5. Belum tepat guna dan tepat sasaran program pemberdayaan masyarakat desa;

6. Masih kurangnya bimbingan, asistensi dan supervisi dalam upaya menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat desa
7. Belum mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain:

- a. Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Memperhatikan Isu Strategis Nasional, Regional dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Majalengka dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, maka Pemerintah Daerah memerlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah kedalam pola organisasi pemerintah daerah.

2.3.1. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Majalengka.

1. Pemerintahan Desa :

- a. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparatur desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa serta peraturan yang terkait lainnya. Yang mengakibatkan, Undang-Undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal.
- b. Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur dalam hal (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur dan kelembagaan tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak

pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat.

- c. Belum optimalnya ketersediaan data Profil Desa, sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa. Ketersediaan data Profil Desa sangat membantu dalam menentukan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah : Daerah (Provinsi,Kabupaten) maupun pusat.
- d. Belum maksimalnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas. Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar terjadi kondisi masyarakat yang aman, nyaman tertib serta adanya kepastian hukum, Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang professional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

2. Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

- a. Belum optimalnya kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait pembinaan adat budaya lokal setempat, serta belum adanya penetapan Desa Adat;
- b. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
- c. Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal.

3. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Teknologi Tepat Guna:

- a. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif;
- b. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saingproduksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.

- c. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara optimal begitu pula sarana perdesaan belum ditata secara baik, sehingga masyarakat belum merasakan secara maksimal manfaat dari sumber daya alam dan sarana prasarana yang dimiliki tersebut;
- d. Penyebarluasan inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) masih sangat rendah, sehingga pemanfaatan teknologi tepat guna belum optimal baik kuantitas maupun kualitas.

2.3.2. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.

Secara umum lemahnya partisipasi masyarakat, mudahnya kearifan dan nilai-nilai lokal yang mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat, antara lain disebabkan oleh :

- a. Proses pembentukan kelembagaan di perdesaan memiliki ciri yang sama, yakni dibentuk dari “atas.” Kelembagaan yang dibentuk umumnya lebih berorientasi pada legalitas dan bukan legitimasi yang tidak perlu mempertimbangkan dukungan masyarakat dan pada sisi lain lembaga yang dibentuk biasanya menyertakan pejabat publik sebagai pelindung dan mempunyai hak veto.
- b. Struktur kelembagaan yang dibentuk umumnya berbentuk hirarki, dengan sedikit memberikan ruang untuk berlangsungnya partisipasi masyarakat. Kekuasaan umumnya terpusat pada pemegang jabatan tertinggi yang justru dipegang pelindung yang pada umumnya dipegang oleh pejabat publik.
- c. Aspek formal dan legalitas mengalahkan nilai-nilai kearifan lokal yang selanjutnya mengakibatkan pendekatan dalam penyelesaian masalah-masalah selalu didasarkan kepada aspek legalitas dan hukum dan bukan berdasarkan hasil pertimbangan musyawarah, nilai, norma ataupun kearifan lokal yang sudah mengakar di masyarakat selama ini.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi kelembagaan masyarakat Majalengka saat ini belum cukup berdaya sebagai wadah yang menyajikan pilihan-pilihan (*choices*) bagi warganya untuk berbagai aspek kehidupan. Begitu pula kelembagaan masyarakat belum cukup berdaya dalam memfasilitasi tersuarakannya aspirasi (*voices*) dalam berbagai aspek kehidupan dari warga masyarakat. Kondisi ini, selain disebabkan oleh proses modernisasi dan praktek pembangunan yang selama ini cenderung mengkondisikan pelemahan

daya kemampuan (*capability deprivation*) atas kelembagaan masyarakat, juga sangat terkait dengan lambatnya proses penguatan wawasan bagi terkuatkannya *techno-structure* maupun *soft-structure* masyarakat yang *adaptif-kreatif* dalam merespon dinamika perubahan. Kondisi ini menuntut agenda pemberdayaan masyarakat yang serius bagi terkuatkannya entitas Majalengka ke depan.

A. Tantangan

Dalam pengembangan fungsi pelayanannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat menjadi tantangan dalam rangka peningkatan kinerja berupa optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Tantangan tersebut meliputi :

- a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut;
- b. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik;
- c. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi prilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat;
- d. Kecenderungan heterogenitas tatanan adat, sosial dan budaya masyarakat;
- e. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal;
- f. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.
- g. Tuntutan ketersediaan data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.

B. Peluang

Selain tantangan tersebut di atas, terdapat pula peluang-peluang antara lain :

- a. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat, program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi salah satu pilar otonomi daerah dan merupakan urusan wajib Kabupaten Majalengka;
- b. Adanya komitmen pemerintah pusat terhadap program percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;

- c. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan yang termuat dalam RPD Kabupaten Majalengka 2024-2026.

Dinas PMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada DPMD Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan Ancaman *Threaths* (Ancaman).

Adapun masing – masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal Kekuatan (*Strength*):

- a. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan atau profesional di bidangnya;
- c. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- d. Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- e. Tersedianya anggaran.

2. Kelemahan (*Weaknesses*):

- a. Tersedianya anggaran;
- b. Terlalu berorientasi pada anggaran;
- c. Belum tersedianya sistem informasi data;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja.

3. Lingkungan Eksternal Peluang (*Oppurtunity*):

- a. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;

- b. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
 - c. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
 - d. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
 - e. Adanya program-program bantuan dari propinsi dan pusat;
 - f. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
4. Ancaman (*Threats*):
- a. Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Bervariatifnya kualitas SDM di pedesaan;
 - c. Besarnya jumlah keluarga miskin;
 - d. Kurangnya pemeliharaan infrastruktur desa yang sudah ada dan masih banyak yang rusak dan belum memadai;
 - e. Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai;
 - f. Masih ada desa yang berpotensi rendah

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-Undang ini menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan perolehan gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih fokus bekerja dalam melayani masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala Desa, Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.

Undang-undang Desa membuka ruang selebar-lebarnya bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanya dana dan kewenangan kepala desa yang istimewa, tetapi undang-undang ini melengkapi dengan pengaturan penguatan kapasitas masyarakat desa dan

pembangunan desa melalui pilar-pilar lembaga kemasyarakatan di desa, lembaga ekonomi desa dan peluang kerjasama antar desa, sehingga memungkinkan desa untuk terbuka berkembang lebih pesat secara bersama. Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 prioritas pembangunan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dan modernisasi BUMDes menjadi sumber utama pendapatan desa.

Tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam perumusan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan adalah focus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk menjadi sasaran RPD.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 3 (tiga) tahu kedepan, pembangunan Jawa Barat diprioritaskan pada :

1. Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, penguatan system ketahanan pangan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata (P1)
2. Reformasi system Pendidikan dan pemajuan kebudayaan serta Pendidikan agama (P2)
3. Penguatan system Kesehatan daerah (P3)
4. Penguatan system perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana (P4)
5. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta Gerakan Membangun Desa (P5)
6. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah (P6)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMD

Untuk merealisasikan tujuan, sasaran dan indikator RPD 2024-2026 Kabupaten Majalengka tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran indikator sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka.

Secara garis besar guna menyelaraskan dan bersinergi dengan tujuan rencana strategis DPMD adalah “Meningkatnya Kemandirian Desa”. Sebagaimana arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015, Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka ditetapkan pula indikator kinerja dari tujuan tersebut yaitu “Indeks Desa Membangun”.

Sasaran yang ingin dicapai guna mendukung sasaran RPD 2024-2026 Kabupaten Majalengka yaitu adalah Meningkatnya Kemandirian Desa. Indikator kinerja sasaran yaitu: Persentase Desa Mandiri. Target indikator kinerja akan berusaha dicapai melalui perhitungan capaian-capaiannya tiap tahun selama 3 tahun sejak tahun 2024 sampai dengan 2026, dapat di lihat pada Tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1. Sasaran dan Indikator Rencana Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026

NOMOR	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN 2024
1	2	3		4		5
1	Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)				Nilai IDM	0,8389
		1.1.	Meningkatnya kemandirian desa	1.1.1.	Persentase Desa Mandiri	55.15

Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 adalah Penguatan Stabilitas Keamanan, Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka untuk Mewujudkan Desa Mandiri, dengan indikasi programnya; a) Penguatan kapasitas lembaga desa; b) Penguatan kapasitas aparatur desa; c) Penguatan kapasitas keuangan desa; d) Penguatan kapasitas infrastruktur perdesaan; dan e) Penguatan kapasitas Pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut yang mengacu pada strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang terkait dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka mempunyai Strategi antara lain :

1. Memperkuat pendampingan tata kelola administrasi keuangan Desa;
2. Memperkuat pendampingan tata kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
3. Meningkatkan Inventarisasi dan Optimalisasi penggalan Potensi Sumber Daya Desa;
4. Memperkuat kelembagaan Ekonomi Desa ;
5. Memfasilitasi pembentukan / Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
6. Mengoptimalkan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menuju BUMDes bersama;
7. Mengembangkan sumber pendapatan dan kekayaan desa;
8. Melaksanakan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa;
9. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
10. Mengembangkan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
11. Meningkatkan peran serta kelembagaan Desa / Kelurahan;
12. Meningkatkan potensi sumber daya desa dan mendorong terciptanya Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan Desa;
13. Penguatan dan pendampingan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3.3. Program dan Kegiatan

Jumlah Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan dan Desa di Tahun 2024 berjumlah 4 (empat) Program dan 4 (empat) Kegiatan yaitu Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas ini adalah sebesar Rp. 15.749.652.554,00. Nilai rinci untuk tiap kegiatan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.2. (Terlampir).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan untuk program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024, disusun dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka menyelaraskan dan bersinergi dengan tujuan rencana strategis DPMD adalah “Meningkatnya Kemandirian Desa” dengan point 0,8389 dan persentase desa mandiri sebesar 55.15% (184 Desa). Sebagaimana arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015, Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka ditetapkan pula indikator kinerja dari tujuan tersebut yaitu “Indeks Desa Membangun”.

Adapun pada RKPD Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jumlah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2024 adal sebanyak 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

Selengkapnya rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, tertuang pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rekapitulasi Renja Per Bidang Urusan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024

Kode	Urusan Bidang Program/Kegiatan/Sub- kegiatan	RENJA (Rp)	RKPD	
			PAGU	%
1	2	3	4	5
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.243.927.693,00	22.243.927.693,00	100.00
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22.243.927.693,00	22.243.927.693,00	100.00
2.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.694.275.139,00	5.694.275.139,00	100.00



Kode	Urusan Bidang Program/Kegiatan/Sub- kegiatan	RENJA (Rp)	RKPD	
			PAGU	%
2.13.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.999.900,00	79.999.900,00	100.00
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.900,00	14.999.900,00	100.00
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	100.00
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	100.00
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	100.00
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	100.00
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	100.00
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100.00
2.13.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.693.452.739,00	4.693.452.739,00	100.00
2.13.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	4.685.452.939,00	4.685.452.939,00	100.00
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.300.000,00	3.300.000,00	100.00
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	4.699.800,00	4.699.800,00	100.00
2.13.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.001,00	100.00
2.13.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000,00	25.000.001,00	100.00
2.13.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.024.900,00	337.024.900,00	100.00
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.785.000,00	23.785.000,00	100.00
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.100.000,00	74.100.000,00	100.00
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.150.000,00	9.150.000,00	100.00
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.990.000,00	84.990.000,00	100.00
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.900,00	19.999.900,00	100.00
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100.00
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.00

Kode	Urusan Bidang Program/Kegiatan/Sub- kegiatan	RENJA (Rp)	RKPD	
			PAGU	%
2.13.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.748.000,00	323.748.000,00	100.00
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.200.000,00	139.200.000,00	100.00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.548.000,00	184.548.000,00	100.00
2.13.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.548.000,00	184.548.000,00	100.00
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.400.000,00	2.400.000,00	100.00
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.649.600,00	182.649.600,00	100.00
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100.00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	3.810.000.000,00	3.810.000.000,00	100.00
2.13.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	3.810.000.000,00	3.810.000.000,00	100.00
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	-	-	
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	3.810.000.000,00	3.810.000.000,00	100.00
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	3.291.453.315,00	3.291.453.315,00	100.00
2.13.03.2.01	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	3.291.453.315,00	3.291.453.315,00	100.00
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	3.291.453.315,00	3.291.453.315,00	100.00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.730.560.400,00	4.730.560.400,00	100.00
2.13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.730.560.400,00	4.730.560.400,00	100.00
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	148.600.400,00	148.600.400,00	100.00
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.051.440.000,00	4.051.440.000,00	100.00
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	100.00
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	96.999.800,00	96.999.800,00	100.00

Kode	Urusan Bidang Program/Kegiatan/Sub- kegiatan	RENJA (Rp)	RKPD	
			PAGU	%
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	155.250.000,00	155.250.000,00	100.00
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	225.270.000,00	225.270.000,00	100.00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100.00
2.13.05.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100.00
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	100.000.000,00	100.000.000,00	100.00
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.196.912.182,00	3.196.912.182,00	100.00
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100.000.000,00	100.000.000,00	100.00
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	420.726.657,00	420.726.657,00	100.00
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	900.000.000,00	900.000.000,00	100.00
Jumlah Total		22.243.927.693,00	22.243.927.693,00	100.00

5.1 Kesimpulan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan, serta program-program pembangunan yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA) serta acuan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai di tahun 2024 yaitu adanya komitmen dan dukungan pimpinan, peran serta masyarakat desa, LSM, Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan dan seluruh aparatur DPMD Kabupaten Majalengka. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024, maka dapat di simpulkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Perlu adanya penajaman kembali fokus program dan kegiatan pembangunan sehingga dampak dari adanya program dan kegiatan pembangunan dapat lebih maksimal dan berdampak nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat;

- b. Belum terwujudnya sinergitas yang optimal diantara berbagai program/kegiatan serta berbagai *stakeholders* yang terlibat;
- c. Belum maksimalnya pembinaan dan bimbingan teknis terhadap masyarakat/sasaran kegiatan yang menyebabkan sikap mental dan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) masyarakat belum terbangun secara baik sehingga menyebabkan dampak dari adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sesaat (setelah kegiatan selesai tidak ada tindak lanjut);
- d. Masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan yang menjadi faktor penghambat dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- e. Presentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan dinilai belum optimal;
- f. Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa belum optimal;
- g. Badan Usaha Milik Desa yang dinilai sudah maju dan mandiri relatif masih sedikit, dimana badan usaha milik desa tersebut seharusnya mendukung dalam kemandirian desa itu sendiri;
- h. Pengelolaan keuanganan desa dinilai belum efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa;
- i. Masih terbatasnya SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5.2. Rekomendasi

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja DPMD Kabupaten Majalengka pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang rencananya akan dilakukan antara lain :

- a. Perlu upaya penggalan sumber-sumber dana pembangunan, baik yang berasal dari provinsi/pusat, bantuan luar negeri ataupun peran swasta serta swadaya dan swadaya masyarakat.
- b. Perlu adanya perumusan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat sehingga dapat menciptakan daya dorong (*trigger efect*) yang dapat menggerakkan kemandirian masyarakat dalam membangun. Hal ini sesuai dengan tujuan dari digulirkannya program/kegiatan pembangunan yaitu untuk memberikan stimulus untuk menciptakan

peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian dampak dari pelaksanaan program/kegiatan akan terwujud secara nyata yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi terwujudnya capaian kinerja hasil pembangunan yang maksimal.

- c. Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perlu ditunjang dengan keberlanjutan program di tahun-tahun selanjutnya sekaligus diikuti dengan bimbingan lanjutan secara intensif sehingga jiwa kewirausahaan di tengah-tengah masyarakat benar-benar terwujud.
- d. Perlu dilakukannya penelaahan dan pengkajian lebih mendalam dan komprehensif terhadap berbagai kemungkinan permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada saat penyusunan rencana program dan kegiatan sebagai langkah antisipasi terhadap hambatan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- e. Pelaksanaan pembinaan baik oleh tingkat desa, kecamatan dan kabupaten kepada kelompok masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan;
- f. Pelaksanaan pelatihan/Bimbingan teknis/sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya aparatur pemerintahan desa serta pelaksanaan pembinaan secara berkesinambungan oleh pihak Kabupaten serta dianggarkannya penambahan modal Badan Usaha Milik Desa;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan secara simultan bagi pengelola keuangan desa sehingga pengelola keuangan desa dapat memahami cara pembuatan dan penyajian pelaporan keuangan daerah;
- h. Melakukan kordinasi dan pengajuan penambahan personil yang kompeten ke Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk penempatan pegawai di DPMD;
- i. Menyusun rencana penambahan sarana dan prasarana pada rencana kegiatan anggaran tahun 2024.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan pikiran jernih, menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi mendukung sepenuhnya atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Majalengka, semoga Allah SWT senantiasa memberikan Taufik dan



Hidayah-Nya kepada kita semua yang memiliki kepedulian dan komitmen bagi keselamatan dan kesejahteraan umat. Aamiin.

Majalengka, Agustus 2024
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka

ANDIK SUJARWO A.P.,M.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19730918 199311 1 001

L A M P I R A N



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Ahmad Kusumah No. 58 Telp / Fax (0233) 281608 Majalengka 45411

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. Bahwa dengan telah berakhirnya masa Jabatan Bupati Kabupaten Majalengka periode Tahun 2018 – 2023, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka diharuskan menyusun dokumen Rencana Strategik (Renstra) Tahun 2024 – 2026;

b. Bahwa Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026, merupakan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026, sekaligus sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan tahunan selama Tahun 2024 – 2026 di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang 2

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018, tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat Online 2011 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 87).
26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 06 Tahun 2023, tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026;
27. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Majalengka Nomor 1172 Tahun 2022, Tentang Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka, Tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka yang berisi Rencana Kerja untuk Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka

ANDIK SUJARWO, A.P.,M.P.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Ahmad Kusumah No. 58 Telp / Fax (0233) 281608 Majalengka 45411

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. Bahwa dengan telah berakhirnya masa Jabatan Bupati Kabupaten Majalengka periode Tahun 2018 – 2023, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka diharuskan menyusun dokumen Rencana Strategik (Renstra) Tahun 2024 – 2026;

b. Bahwa Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026, merupakan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026, sekaligus sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan tahunan selama Tahun 2024 – 2026 di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang 2

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018, tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat Online 2011 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 87).
26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 06 Tahun 2023, tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026;
27. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Majalengka Nomor 1172 Tahun 2022, Tentang Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa, Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan susunan personalia dan Uraian Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
- b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
- c. Menyusun materi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;

- d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
- e. Melaksanakan pendistribusian Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka

ANDIK SUJARWO, A.P.,M.P.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor :
Tanggal : Januari 2023
Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2024.**

**I. SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2024**

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka
- Ketua Pelaksana : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
- Sekretaris : Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka
- Koordinator Tim Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan
Desa : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan
Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;
- Anggota : 1. Jabatan Fungsional Ahli Muda Penggerak
Swadaya Masyarakat pada Bidang
Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan
Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka ;
2. Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan
Ekonomi dan Pembangunan Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka.
- Koordinator Tim Pemberdayaan Potensi
Desa : Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka.
- Anggota 1. Jabatan Fungsional Ahli Muda Penggerak
Swadaya Masyarakat Bidang Pemberdayaan
Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;
2. Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Potensi
Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka ;

Koordinator Tim Bidang Pemerintahan Desa : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;

Anggota

1. Jabatan Fungsional Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;
2. Pelaksana pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka .

Koordinator Tim Penyusunan Bahan / Editing dan Penyelarasan Laporan : Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;

Anggota

1. Jabatan Fungsional Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;
2. Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;

Koordinator Tim Kesekretariatan dan Penyusunan Bahan / Editing dan Penyelarasan Laporan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;

Anggota

1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;
2. Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
3. Pelaksana Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka ;

II. URAIAN TUGAS 3

II. URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2024.

1. PENANGGUNGJAWAB:

- a. Memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku mengenai penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
- b. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
- c. Menandatangani dan Menetapkan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.

2. KETUA PELAKSANA :

- a. Membantu Penanggungjawab dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
- c. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- d. Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang penyusun materi.
- e. Memberikan pelayanan kepada seluruh Bidang penyusun materi.
- f. Menyusun Jadwal Kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- g. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- h. Membuat laporan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan petunjuk dan arahan Penanggungjawab.

3. SEKRETARIS :

- a. Membantu Ketua pelaksana dalam hal pengumpulan data guna Penulisan dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- b. Membantu Ketua pelaksana dalam hal Penulisan dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- c. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.

4. KOORDINATOR.....

4. KOORDINATOR TIM BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA :

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan materi/bahan/data bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Desa.

5. ANGGOTA PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGANN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DESA:

- a. Membantu Koordinator Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Desa selama melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Desa dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.

6. KOORDINATOR TIM BIDANG PEMBERDAYAAN POTENSI DESA:

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/Data Bidang Pemberdayaan Potensi Desa.

7. ANGGOTA TIM BIDANG PEMBERDAYAAN POTENSI DESA:

- a. Membantu Koordinator Bidang Pemberdayaan Potensi Desa selama melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.

8. KOORDINATOR TIM BIDANG BIDANG PEMERINTAHAN DESA :

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/Data Bidang Pemerintahan Desa.

9. ANGGOTA TIM BIDANG PEMERINTAHAN DESA :

- a. Membantu Koordinator Tim Bidang Pemerintahan Desa selama melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.

b. Melaksanakan

- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang Bidang Pemerintahan Desa dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.

10. KOORDINTOR TIM BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN:

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/ Data Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

11. ANGGOTA KOORDINATOR TIM PENYUSUNAN BAHAN / EDITING DAN PENYELARASAN LAPORAN :

- a. Membantu Koordinator Bidang Penyusunan Bahan / Editing / dan penyelarasan selama melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang Penyusunan Bahan / Editing dan Penyelarasan Laporan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.

12. KOORDINATOR TIM KESEKRETARIATAN DAN PENYUSUNAN BAHAN / EDITING DAN PENYELARASAN LAPORAN:

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan urusan kesekretariatan dan Penyusunan Bahan / Editing / dan penyelarasan.

13. ANGGOTA TIM KESEKRETARIATAN :

- a. Membantu Koordinator Tim Bidang Kesekretariatan dan Penyusunan Bahan / Editing / dan penyelarasan selama melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Tim Bidang Kesekretariatan dan Penyusunan Bahan / Editing / dan penyelarasan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.

**KEPALA,
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAJALENGKA**

ANDIK SUJARWO A.P.,M.P.

Tabel. 2.3
REKAPITULASI STATUS DESA MANDIRI
TAHUN 2024

NO	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
1	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	CIPASUNG	0,8914	0,7833	0,9333	0,8694	MANDIRI
2	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	BANGBAYANG	0,8743	0,75	0,9333	0,8525	MANDIRI
3	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	BOROGOJOL	0,8229	0,75	0,9333	0,8354	MANDIRI
4	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	CIBULAN	0,8171	0,7	0,9333	0,8168	MANDIRI
5	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	LEMAHPUTIH	0,8914	0,8	0,9333	0,8749	MANDIRI
6	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	SADAWANGI	0,8571	0,7167	0,9333	0,8357	MANDIRI
7	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	KEPUH	0,8229	0,7833	0,8667	0,8243	MANDIRI
8	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	PADAREK	0,8971	0,85	0,8667	0,8713	MANDIRI
9	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	KALAPADUA	0,8	0,8333	0,8667	0,8333	MANDIRI
10	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	CIGALEUH	0,8743	0,7833	0,9333	0,8637	MANDIRI
11	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	MARGAJAYA	0,7886	0,85	1	0,8795	MANDIRI
12	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	SUKAJADI	0,88	0,75	0,9333	0,8544	MANDIRI
13	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	MEKARWANGI	0,8171	0,7833	0,8667	0,8224	MANDIRI
14	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	SINARGALIH	0,8114	0,7333	0,9333	0,826	MANDIRI
15	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	MEKARMULYA	0,8686	0,7833	0,8667	0,8395	MANDIRI
16	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	SUKAMAJU	0,8629	0,7833	0,9333	0,8598	MANDIRI
17	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	CISALAK	0,8	0,7333	0,9333	0,8222	MANDIRI
18	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	DAYEUHWANGI	0,8343	0,7333	0,9333	0,8337	MANDIRI
19	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	LEMAHSUGIH	0,8686	0,7833	0,8667	0,8395	MANDIRI
20	MAJALENGKA	321002	BANTARUJEG	BANTARUJEG	0,9543	0,95	0,9333	0,9459	MANDIRI
21	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	CIKIJING	0,92	0,9667	0,9333	0,94	MANDIRI
22	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	BANJARANSARI	0,8743	0,7833	0,8	0,8192	MANDIRI
23	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	KASTURI	0,8457	0,8167	0,8	0,8208	MANDIRI
24	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	CIDULANG	0,8514	0,6667	0,9333	0,8171	MANDIRI
25	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	SUKAMUKTI	0,8114	0,8167	0,8667	0,8316	MANDIRI
26	MAJALENGKA	321004	TALAGA	CIBEUREUM	0,8571	0,7167	0,9333	0,8357	MANDIRI
27	MAJALENGKA	321004	TALAGA	CAMPAGA	0,92	0,7333	0,9333	0,8622	MANDIRI
28	MAJALENGKA	321004	TALAGA	TALAGAKULON	0,9657	0,9333	0,6667	0,8552	MANDIRI
29	MAJALENGKA	321004	TALAGA	TALAGAWETAN	0,9429	0,9667	0,8	0,9032	MANDIRI
30	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	SAGARA	0,8514	0,7333	0,9333	0,8394	MANDIRI
31	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	CIBUNUT	0,7714	0,75	0,9333	0,8183	MANDIRI
32	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	TEJAMULYA	0,8171	0,75	0,9333	0,8335	MANDIRI
33	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	SUKASARI KALER	0,8914	0,85	1	0,9138	MANDIRI
34	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	ARGAMUKTI	0,8629	0,7667	1	0,8765	MANDIRI
35	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	SADASARI	0,8914	0,6167	1	0,836	MANDIRI
36	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	HAURSEAH	0,9029	0,6833	1	0,8621	MANDIRI
37	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	HEUBEULISUK	0,9143	0,65	1	0,8548	MANDIRI
38	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	SUKASARI KIDUL	0,8629	0,7667	1	0,8765	MANDIRI
39	MAJALENGKA	321006	MAJA	CIHAUR	0,9257	0,7333	0,8	0,8197	MANDIRI
40	MAJALENGKA	321006	MAJA	WANAHAYU	0,8743	0,7167	0,8667	0,8192	MANDIRI
41	MAJALENGKA	321006	MAJA	MALONGPONG	0,9143	0,7667	0,8667	0,8492	MANDIRI
42	MAJALENGKA	321006	MAJA	TEGALSARI	0,9029	0,8333	0,7333	0,8232	MANDIRI
43	MAJALENGKA	321006	MAJA	MAJA UTARA	0,9143	0,8333	0,9333	0,8937	MANDIRI
44	MAJALENGKA	321006	MAJA	KERTABASUKI	0,8343	0,85	0,8667	0,8503	MANDIRI
45	MAJALENGKA	321006	MAJA	BANJARAN	0,84	0,7833	0,8667	0,83	MANDIRI
46	MAJALENGKA	321006	MAJA	PANIIS	0,9086	0,7333	0,8667	0,8362	MANDIRI
47	MAJALENGKA	321006	MAJA	MAJA SELATAN	0,9314	0,95	0,9333	0,9383	MANDIRI
48	MAJALENGKA	321007	MAJALENGKA	SIDAMUKTI	0,8857	0,7	0,9333	0,8397	MANDIRI
49	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	PADAHANTEN	0,84	0,7833	0,8667	0,83	MANDIRI
50	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	SUKAHAJI	0,8971	0,7833	0,8667	0,849	MANDIRI
51	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	PALABUAN	0,8514	0,8167	0,8667	0,8449	MANDIRI
52	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	CIKONENG	0,8514	0,8667	0,9333	0,8838	MANDIRI
53	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	CIKALONG	0,9486	0,8667	0,6667	0,8273	MANDIRI
54	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	TEJA	0,8343	0,6833	0,9333	0,817	MANDIRI
55	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	PAYUNG	0,9029	0,7167	0,8667	0,8287	MANDIRI
56	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	BABAKANKAREO	0,7486	0,7	1	0,8162	MANDIRI

NO	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
57	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	SADOMAS	0,8743	0,65	0,9333	0,8192	MANDIRI
58	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	RAJAGALUH KIDUL	0,8629	0,7167	0,9333	0,8376	MANDIRI
59	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	RAJAGALUH LOR	0,9543	0,9833	0,8667	0,9348	MANDIRI
60	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	RAJAGALUH	0,9257	0,8667	0,8667	0,8863	MANDIRI
61	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	LAME	0,8286	0,7667	0,8667	0,8206	MANDIRI
62	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	LEUWIKUJANG	0,9314	0,9167	0,8	0,8827	MANDIRI
63	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	MIRAT	0,8971	0,9167	0,8667	0,8935	MANDIRI
64	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	LEUWIMUNDING	0,92	0,9	0,8667	0,8956	MANDIRI
65	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	CIPARAY	0,9086	0,7333	0,8667	0,8362	MANDIRI
66	MAJALENGKA	321011	JATIWANGI	BURUJUL KULON	0,8743	0,85	1	0,9081	MANDIRI
67	MAJALENGKA	321011	JATIWANGI	BURUJUL WETAN	0,9143	0,85	1	0,9214	MANDIRI
68	MAJALENGKA	321011	JATIWANGI	CICADAS	0,8629	0,9	0,8667	0,8765	MANDIRI
69	MAJALENGKA	321011	JATIWANGI	ANDIR	0,9371	0,8667	1	0,9346	MANDIRI
70	MAJALENGKA	321011	JATIWANGI	SUKARAJA WETAN	0,8629	0,8167	1	0,8932	MANDIRI
71	MAJALENGKA	321011	JATIWANGI	PINANGRAJA	0,8114	0,7833	1	0,8649	MANDIRI
72	MAJALENGKA	321011	JATIWANGI	CIBENTAR	0,8857	0,7	0,8667	0,8175	MANDIRI
73	MAJALENGKA	321011	JATIWANGI	LEUWEUNGGEDE	0,8629	0,7167	1	0,8598	MANDIRI
74	MAJALENGKA	321011	JATIWANGI	CIBOLERANG	0,96	0,8833	0,8667	0,9033	MANDIRI
75	MAJALENGKA	321011	JATIWANGI	SUTAWANGI	0,9257	0,9167	0,8667	0,903	MANDIRI
76	MAJALENGKA	321011	JATIWANGI	JATISURA	0,9257	0,7667	1	0,8975	MANDIRI
77	MAJALENGKA	321011	JATIWANGI	JATIWANGI	0,8857	0,8167	1	0,9008	MANDIRI
78	MAJALENGKA	321011	JATIWANGI	SUKARAJA KULON	0,96	0,9	0,8667	0,9089	MANDIRI
79	MAJALENGKA	321011	JATIWANGI	MEKARSARI	0,9429	0,9	1	0,9476	MANDIRI
80	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	GANDU	0,8571	0,8	0,8667	0,8413	MANDIRI
81	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	DAWUAN	0,88	0,85	0,9333	0,8878	MANDIRI
82	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	GENTENG	0,8743	0,8167	0,9333	0,8748	MANDIRI
83	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	MANDAPA	0,8571	0,8167	0,9333	0,869	MANDIRI
84	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	BALIDA	0,92	0,7	0,8667	0,8289	MANDIRI
85	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	BOJONGCIDERES	0,9086	0,8667	0,9333	0,9029	MANDIRI
86	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	SINARJATI	0,84	0,8167	0,9333	0,8633	MANDIRI
87	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	BATURUYUK	0,8286	0,7167	1	0,8484	MANDIRI
88	MAJALENGKA	321013	KADIPATEN	HEULEUT	0,9543	0,8833	1	0,9459	MANDIRI
89	MAJALENGKA	321013	KADIPATEN	KADIPATEN	0,9371	0,95	0,9333	0,9402	MANDIRI
90	MAJALENGKA	321013	KADIPATEN	BABAKANANYAR	0,8114	0,7333	0,9333	0,826	MANDIRI
91	MAJALENGKA	321013	KADIPATEN	KARANGSAMBUNG	0,9029	0,8	0,9333	0,8787	MANDIRI
92	MAJALENGKA	321013	KADIPATEN	LIANGJULANG	0,9371	0,9167	0,9333	0,929	MANDIRI
93	MAJALENGKA	321013	KADIPATEN	PAGANDON	0,9429	0,9	1	0,9476	MANDIRI
94	MAJALENGKA	321013	KADIPATEN	CIPAKU	0,9143	0,8333	0,8667	0,8714	MANDIRI
95	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	PAKUBEUREUM	0,84	0,8	0,8667	0,8356	MANDIRI
96	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	SUKAWANA	0,8057	0,9833	0,9333	0,9075	MANDIRI
97	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	KERTAWINANGUN	0,9886	0,9667	0,8	0,9184	MANDIRI
98	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	PALASAH	0,9029	0,8333	1	0,9121	MANDIRI
99	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	BABAKAN	0,8057	0,8667	0,8667	0,8463	MANDIRI
100	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	KERTAJATI	0,9486	0,95	0,8	0,8995	MANDIRI
101	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	PASIRIPIS	0,92	0,7333	0,9333	0,8622	MANDIRI
102	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	MEKARJAYA	0,8914	0,7	0,8667	0,8194	MANDIRI
103	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	MEKARMULYA	0,96	0,8333	0,6667	0,82	MANDIRI
104	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	SUKAKERTA	0,88	0,8333	0,9333	0,8822	MANDIRI
105	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	BIYAWAK	0,8857	0,7667	0,9333	0,8619	MANDIRI
106	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	PANONGAN	0,9314	0,9667	0,9333	0,9438	MANDIRI
107	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	RANDEGAN WETAN	0,9429	0,9667	0,6	0,8365	MANDIRI
108	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	PUTRIDALEM	0,9029	0,7667	1	0,8898	MANDIRI
109	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	JATITENGAH	0,9486	0,8167	1	0,9217	MANDIRI
110	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	JATITUJUH	0,8571	0,9	0,9333	0,8968	MANDIRI
111	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	PILANGSARI	0,9314	0,7667	1	0,8994	MANDIRI
112	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	SUMBER WETAN	0,8857	0,7167	0,8667	0,823	MANDIRI
113	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	RANDEGAN KULON	0,92	0,9333	0,6	0,8178	MANDIRI
114	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	SUMBER KULON	0,8971	0,6833	0,8667	0,8157	MANDIRI
115	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	PASINDANGAN	0,9029	1	0,9333	0,9454	MANDIRI
116	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	BEBER	0,8514	0,7667	1	0,8727	MANDIRI
117	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	BUNTU	0,8629	0,7667	0,9333	0,8543	MANDIRI

NO	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
118	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	LIGUNG	0,88	0,7167	0,9333	0,8433	MANDIRI
119	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	BANTARWARU	0,8343	0,8333	0,9333	0,867	MANDIRI
120	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	LIGUNG LOR	0,8229	0,7167	1	0,8465	MANDIRI
121	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	GANDAWESI	0,9143	0,6833	1	0,8659	MANDIRI
122	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	KODASARI	0,7943	0,8	1	0,8648	MANDIRI
123	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	BONGAS WETAN	0,8857	0,85	0,8667	0,8675	MANDIRI
124	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	BONGAS KULON	0,8686	0,8833	0,9333	0,8951	MANDIRI
125	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	GARAWANGI	0,8629	0,8	0,9333	0,8654	MANDIRI
126	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	RANCAPUTAT	0,8686	0,8167	0,8667	0,8506	MANDIRI
127	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	BANJARAN	0,8514	0,7167	0,9333	0,8338	MANDIRI
128	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	SEPAT	0,8343	0,7833	0,8667	0,8281	MANDIRI
129	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	PANINGKIRAN	0,8629	0,85	0,8667	0,8598	MANDIRI
130	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	PANJALIN KIDUL	0,8914	0,9	0,8	0,8638	MANDIRI
131	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	LOJIKOBONG	0,84	0,8833	0,8667	0,8633	MANDIRI
132	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	PANJALIN LOR	0,8343	0,75	0,8667	0,817	MANDIRI
133	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	SUMBERJAYA	0,92	0,85	1	0,9233	MANDIRI
134	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	PANCAKSUJI	0,8743	0,6833	0,9333	0,8303	MANDIRI
135	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	CIJUREY	0,8343	0,7167	1	0,8503	MANDIRI
136	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	PASIRMUNCANG	0,9086	0,75	1	0,8862	MANDIRI
137	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	JATIPAMOR	0,9257	0,8333	0,9333	0,8975	MANDIRI
138	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	BANTRANGSANA	0,88	0,75	0,8667	0,8322	MANDIRI
139	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	JATISERANG	0,8857	0,7833	1	0,8897	MANDIRI
140	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	BONANG	0,8914	0,6833	0,9333	0,836	MANDIRI
141	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	LEUWISEENG	0,8343	0,7	0,9333	0,8225	MANDIRI
142	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	PANYINGKIRAN	0,9371	0,7	0,9333	0,8568	MANDIRI
143	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	KARYAMUKTI	0,96	0,8667	0,9333	0,92	MANDIRI
144	MAJALENGKA	321019	PALASAH	PALASAH	0,9486	0,8333	0,6667	0,8162	MANDIRI
145	MAJALENGKA	321019	PALASAH	WERAGATI	0,8629	1	0,6667	0,8432	MANDIRI
146	MAJALENGKA	321019	PALASAH	TRAJAYA	0,9257	0,8667	0,6667	0,8197	MANDIRI
147	MAJALENGKA	321019	PALASAH	TARIKOLOT	0,9486	0,8333	0,6667	0,8162	MANDIRI
148	MAJALENGKA	321019	PALASAH	SINDANGHAJI	0,9314	0,85	0,6667	0,816	MANDIRI
149	MAJALENGKA	321019	PALASAH	WARINGIN	0,9657	0,8167	0,6667	0,8163	MANDIRI
150	MAJALENGKA	321020	CIGASONG	KAWUNGHILIR	0,8057	0,8667	0,9333	0,8686	MANDIRI
151	MAJALENGKA	321020	CIGASONG	TENJOLAYAR	0,9143	0,8333	0,8667	0,8714	MANDIRI
152	MAJALENGKA	321020	CIGASONG	KUTAMANGGU	0,9771	0,85	0,9333	0,9202	MANDIRI
153	MAJALENGKA	321020	CIGASONG	KARAYUNAN	0,9657	0,9333	1	0,9663	MANDIRI
154	MAJALENGKA	321021	SINDANGWANGI	BANTARAGUNG	0,8343	0,8667	0,9333	0,8781	MANDIRI
155	MAJALENGKA	321021	SINDANGWANGI	LENGKONG KULON	0,8514	0,8833	0,8	0,8449	MANDIRI
156	MAJALENGKA	321021	SINDANGWANGI	JERUKLEUEUT	0,8343	0,8	0,9333	0,8559	MANDIRI
157	MAJALENGKA	321021	SINDANGWANGI	SINDANGWANGI	0,9314	0,8333	1	0,9216	MANDIRI
158	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	BANJARAN	0,88	0,9	0,9333	0,9044	MANDIRI
159	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	CIMEONG	0,9086	0,9	0,9333	0,914	MANDIRI
160	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	SANGIANG	0,8857	0,6333	0,9333	0,8175	MANDIRI
161	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	HEGARMANAH	0,8286	0,8333	0,9333	0,8651	MANDIRI
162	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	GIRIMULYA	0,8857	0,8	0,8667	0,8508	MANDIRI
163	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	WANGKELANG	0,8514	0,7167	0,9333	0,8338	MANDIRI
164	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	CINGAMBUL	0,8971	0,9	0,8667	0,8879	MANDIRI
165	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	CIKONDANG	0,8971	0,65	1	0,849	MANDIRI
166	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	CIRANJENG	0,92	0,9	1	0,94	MANDIRI
167	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	MUKTISARI	0,84	0,6833	0,9333	0,8189	MANDIRI
168	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	LEUWIKIDANG	0,9371	0,6333	0,9333	0,8346	MANDIRI
169	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	RANJI KULON	0,9143	0,6	0,9333	0,8159	MANDIRI
170	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	RANJI WETAN	0,9029	0,6833	0,8667	0,8176	MANDIRI
171	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	GUNUNGSARI	0,9371	0,6833	0,8667	0,829	MANDIRI
172	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	KASOKANDEL	0,8514	0,7333	0,8667	0,8171	MANDIRI
173	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	WANAJAYA	0,88	0,7167	0,8667	0,8211	MANDIRI
174	MAJALENGKA	321025	SINDANG	GUNUNGKUNING	0,8571	0,8	0,8	0,819	MANDIRI
175	MAJALENGKA	321026	MAL AUSMA	WERASARI	0,8857	0,8	0,9333	0,873	MANDIRI
176	MAJALENGKA	321026	MAL AUSMA	MAL AUSMA	0,9486	0,9667	0,9333	0,9495	MANDIRI
TOTAL					0,8843	0,8037	0,9023	1,9888	MANDIRI



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jln.Ahmad Kusumah No.58 Tlp.(0233) 281608

Email: dpmdmajalengka74@gmail.com

Website: <http://dinaspm.dmajalengka.go.id>

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di:

1. Kabupaten : **MAJALENGKA**
2. Provinsi : **JAWA BARAT**

Telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Kabupaten hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan desa IDM Tahun 2024 dengan hasil terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

disahkan Tim Verifikasi,



Drs.H.YAYAN SUMANTRI,M.Si.
NIP.196707241986031002



ANDIK SUJARWO,AP.,MP.
NIP.197309181993111001



MAMAN ROHMAN

REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012001	Cipasung	0.8914	0.7834	0.9333	0.8694	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012002	Bangbayang	0.8743	0.7500	0.9333	0.8525	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012003	Borogojol	0.8229	0.7500	0.9333	0.8354	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012004	Cibulan	0.8171	0.7000	0.9333	0.8168	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012005	Lemahputih	0.8914	0.8000	0.9333	0.8749	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012006	Sadawangi	0.8571	0.7167	0.9333	0.8357	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012007	Kepuh	0.8229	0.7833	0.8667	0.8243	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012008	Padarek	0.8971	0.9333	0.8667	0.8990	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012009	Kalapadua	0.8000	0.8333	0.9333	0.8556	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012010	Cigaleuh	0.8744	0.7833	0.9333	0.8637	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012011	Margajaya	0.8171	0.8500	0.9333	0.8668	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012012	Sukajadi	0.8800	0.7333	0.9333	0.8489	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012013	Mekarwangi	0.8229	0.7833	0.8667	0.8243	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012014	Sinargalih	0.8114	0.7333	0.9333	0.8260	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012015	Mekarmulya	0.8400	0.7833	0.8667	0.8300	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012016	Sukamaju	0.8630	0.7831	0.9333	0.8598	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012019	Cisalak	0.8000	0.7333	0.9333	0.8222	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012018	Dayeuhwangi	0.8344	0.7334	0.9333	0.8337	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321001	LEMAHSUGIH	3210012019	Lemahsugih	0.8690	0.7830	0.9330	0.8617	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321002	BANTARUJEG	3210022002	Cipeundeuy	0.7886	0.6000	0.8667	0.7518	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321002	BANTARUJEG	3210022008	Cimangguhilir	0.7486	0.6330	0.9337	0.7718	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321002	BANTARUJEG	3210022009	Salawangi	0.8286	0.6833	0.6667	0.7262	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321002	BANTARUJEG	3210022010	Bantarujeg	0.9543	0.9500	0.9333	0.9459	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321002	BANTARUJEG	3210022011	Gununglarang	0.7943	0.7167	0.8667	0.7926	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321002	BANTARUJEG	3210022012	Cikidang	0.8667	0.5667	0.7600	0.7311	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321002	BANTARUJEG	3210022013	Cinambo	0.8400	0.6170	0.6000	0.6857	Berkembang
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321002	BANTARUJEG	3210022014	Haurgeulis	0.8000	0.7000	0.8667	0.7889	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321002	BANTARUJEG	3210022015	Sukamenak	0.7771	0.5667	1.0000	0.7813	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321002	BANTARUJEG	3210022016	Wadowetan	0.8570	0.7670	0.5330	0.7190	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321002	BANTARUJEG	3210022019	Babakansari	0.8743	0.7167	0.6000	0.7303	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321002	BANTARUJEG	3210022018	Silihwangi	0.8971	0.7333	0.8000	0.8101	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321002	BANTARUJEG	3210022022	Sindanghurip	0.7600	0.5667	0.8667	0.7311	Maju

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	3210032001	Sukasari	0.8290	0.6830	0.8670	0.7929	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	3210032002	Cisoka	0.8110	0.6170	0.9333	0.7871	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	3210032003	Sindangpanji	0.7660	0.6500	0.8000	0.7386	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	3210032004	Cikijing	0.9200	0.9670	0.9330	0.9400	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	3210032005	Sindang	0.7660	0.6830	0.8670	0.7719	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	3210032006	Banjaransari	0.8742	0.7833	0.8000	0.8192	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	3210032007	Kasturi	0.8460	0.8170	0.8000	0.8208	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	3210032008	Cidulang	0.8512	0.6670	0.9330	0.8171	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	3210032009	Jagasari	0.7890	0.7170	0.6670	0.7243	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	3210032010	Bagjasari	0.7712	0.7000	0.8000	0.7571	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	3210032011	Sunalari	0.6914	0.6333	0.8667	0.7305	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	3210032012	Cipulus	0.7370	0.6200	0.8670	0.7402	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	3210032013	Kancana	0.7770	0.7830	0.8670	0.8090	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	3210032014	Sukamukti	0.7890	0.8170	0.8670	0.8243	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321003	CIKIJING	3210032015	Cilancang	0.8060	0.6670	0.8670	0.7798	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042001	Lampuyang	0.8343	0.5834	0.8664	0.7614	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042002	Cibeureum	0.8571	0.7166	0.9333	0.8357	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042003	Cikeusal	0.8400	0.6000	0.8667	0.7689	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042004	Jatipamor	0.8629	0.6833	0.8667	0.8043	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042005	Argasari	0.8170	0.6670	0.8670	0.7835	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042006	Cicanir	0.8300	0.7700	0.6700	0.7647	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042007	Campaga	0.9200	0.7333	0.9333	0.8622	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042008	Sukaperna	0.8743	0.6167	0.6667	0.7192	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042009	Talaga Kulon	0.9657	0.9333	0.6667	0.8552	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042010	Talaga Wetan	0.9429	0.9667	0.8000	0.9032	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042011	Ganeas	0.9029	0.6333	0.6667	0.7343	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042012	Salado	0.7829	0.6500	0.8000	0.7443	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042013	Gunung Manik	0.7829	0.6333	0.8667	0.7610	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042014	Kertahayu	0.8114	0.5333	0.8667	0.7371	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042015	Mekarrahajra	0.8970	0.6500	0.6670	0.7379	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042016	Margamukti	0.8857	0.5500	0.8667	0.7675	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321004	TALAGA	3210042019	Mekarhurip	0.8460	0.6500	0.8670	0.7857	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	3210052001	Sagara	0.8515	0.7333	0.9333	0.8394	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	3210052002	Cibunut	0.7715	0.7500	0.9333	0.8183	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	3210052003	Tejamulya	0.8171	0.7500	0.9333	0.8335	Mandiri

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	3210052004	Sukasari Kaler	0.8914	0.8500	1.0000	0.9138	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	3210052005	Argamukti	0.8629	0.7667	1.0000	0.8765	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	3210052006	Sukadana	0.8060	0.6833	0.9333	0.8075	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	3210052007	Sadasari	0.8914	0.6167	1.0000	0.8360	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	3210052008	Haurseah	0.9029	0.6833	1.0000	0.8621	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	3210052009	Mekarwangi	0.8400	0.6500	0.9333	0.8078	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	3210052010	Cikaracak	0.7371	0.5833	1.0000	0.7735	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	3210052011	Heubeulisuk	0.9143	0.6500	1.0000	0.8548	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	3210052012	Sukasari Kidul	0.8629	0.7667	1.0000	0.8765	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	3210052013	Gunungwangi	0.7600	0.5500	1.0000	0.7700	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321005	ARGAPURA	3210052014	Argalingga	0.7143	0.7500	0.9333	0.7992	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062001	Cihaur	0.9260	0.7333	0.8000	0.8197	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062002	Wanahayu	0.8743	0.7167	0.8667	0.8192	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062003	Cengal	0.8114	0.6833	0.6667	0.7205	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062004	Anggrawati	0.8057	0.7667	0.8667	0.8130	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062005	Cipicung	0.7943	0.7000	0.8667	0.7870	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062006	Malongpong	0.9143	0.7667	0.8667	0.8492	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062007	Tegalsari	0.9029	0.8333	0.7333	0.8232	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062008	Maja Utara	0.9143	0.8333	0.9333	0.8937	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062009	Pasangrahan	0.8457	0.7167	0.8667	0.8097	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062010	Cieurih	0.8971	0.6000	0.8667	0.7879	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062011	Kartabasuki	0.8343	0.8500	0.8667	0.8503	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062012	Sindangkerta	0.8514	0.7500	0.6000	0.7338	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062013	Banjaran	0.8400	0.7833	0.8667	0.8300	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062014	Paniis	0.9086	0.7333	0.8667	0.8362	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062015	Cicalung	0.8057	0.7500	0.8667	0.8075	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062016	Pageraji	0.8171	0.6833	0.8667	0.7890	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062019	Maja Selatan	0.9314	0.9500	0.9333	0.9382	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321006	MAJA	3210062018	Nunuk Baru	0.7714	0.6000	0.6000	0.6571	Berkembang
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321007	MAJALENGKA	3210072005	Kulur	0.8800	0.6333	0.6667	0.7267	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321007	MAJALENGKA	3210072006	Kawunggirang	0.8740	0.7170	0.6670	0.7527	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321007	MAJALENGKA	3210072012	Sidamukti	0.8860	0.6170	1.0000	0.8341	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321007	MAJALENGKA	3210072014	Cibodas	0.7943	0.6166	0.8667	0.7592	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	3210082001	Ciomas	0.8343	0.7833	0.6667	0.7614	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	3210082002	Padahanten	0.8400	0.7833	0.8667	0.8300	Mandiri

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	3210082009	Sukahaji	0.8971	0.7833	0.8667	0.8490	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	3210082010	Salagedang	0.8743	0.7833	0.6000	0.7525	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	3210082011	Cikeusik	0.7943	0.8167	0.7333	0.7814	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	3210082012	Jayi	0.8457	0.7167	0.6667	0.7430	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	3210082013	Nanggower	0.8686	0.7500	0.6667	0.7617	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	3210082014	Palabuan	0.8514	0.8167	0.8667	0.8449	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	3210082015	Cikoneng	0.8514	0.8667	0.9333	0.8838	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	3210082016	Babakanmanjeti	0.8629	0.7500	0.8000	0.8043	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	3210082017	Tanjung Sari	0.8686	0.9000	0.6000	0.7895	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	3210082018	Cikalong	0.9486	0.8667	0.6667	0.8273	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321008	SUKAHAJI	3210082019	Candrajaya	0.8171	0.6667	0.9333	0.8057	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092001	Pajajar	0.8629	0.6167	0.8000	0.7598	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092002	Teja	0.8343	0.6833	0.9333	0.8170	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092003	Payung	0.9030	0.7170	0.8670	0.8287	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092004	Babakan Kareo	0.8057	0.6500	1.0000	0.8186	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092005	Sindangpano	0.7943	0.6333	0.8667	0.7648	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092006	Sadomas	0.8743	0.6500	0.9333	0.8192	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092007	Kumbung	0.8857	0.6333	0.8667	0.7952	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092008	Rajagaluh Kidul	0.8629	0.7167	0.9333	0.8376	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092009	Singawada	0.8800	0.6333	0.8667	0.7933	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092010	Rajagaluh Lor	0.9543	0.9833	0.8667	0.9348	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092011	Cipinang	0.8630	0.7170	0.8670	0.8154	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092012	Cisetu	0.8229	0.7167	0.8667	0.8021	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321009	RAJAGALUH	3210092013	Rajagaluh	0.9257	0.8667	0.8667	0.8863	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	3210102001	Parakan	0.9200	0.7500	0.6667	0.7789	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	3210102002	Patunan	0.9086	0.6500	0.6667	0.7417	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	3210102003	Nangerang	0.8457	0.6833	0.6667	0.7319	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	3210102004	Lame	0.8286	0.7667	0.8667	0.8206	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	3210102005	Mindi	0.8229	0.7000	0.6667	0.7298	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	3210102006	Rajawangi	0.8400	0.6500	0.9333	0.8078	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	3210102007	Leuwikujiang	0.9314	0.9167	0.8000	0.8827	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	3210102008	Mirat	0.8971	0.9167	0.8667	0.8935	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	3210102009	Leuwimunding	0.9200	0.9000	0.8667	0.8956	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	3210102010	Ciparay	0.9086	0.7333	0.8667	0.8362	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	3210102011	Heuleut	0.9543	0.7000	0.6667	0.7737	Maju

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	3210102012	Karangasem	0.8914	0.7333	0.6667	0.7638	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	3210102013	Tanjung Sari	0.8914	0.7167	0.6667	0.7583	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321010	LEUWIMUNDING	3210102014	Parung Jaya	0.8457	0.7333	0.6000	0.7263	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112001	Burujul Kulon	0.8743	0.8500	1.0000	0.9081	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112002	Burujul Wetan	0.9143	0.8500	1.0000	0.9214	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112003	Cicadas	0.8629	0.9000	0.8667	0.8765	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112004	Andir	0.9371	0.8667	1.0000	0.9346	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112005	Sukaraja Wetan	0.8629	0.8167	1.0000	0.8932	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112006	Pinangraja	0.8114	0.7833	1.0000	0.8649	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112007	Cibentar	0.8857	0.7000	0.8667	0.8175	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112008	Leuweunggede	0.8629	0.7167	1.0000	0.8598	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112009	Cibolerang	0.9600	0.8833	0.8667	0.9033	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112010	Sutawangi	0.9257	0.9167	0.8667	0.9030	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112011	Jatisura	0.9257	0.7667	1.0000	0.8975	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112012	Jatiwangi	0.8857	0.8167	1.0000	0.9008	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112013	Loji	0.8743	0.8333	0.6667	0.7914	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112014	Sukaraja Kulon	0.9600	0.9000	0.8667	0.9089	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112015	Mekarsari	0.9429	0.9000	1.0000	0.9476	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321011	JATI WANGI	3210112016	Surawangi	0.9086	0.7667	0.6667	0.7806	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	3210122006	Gandu	0.8690	0.8000	0.8670	0.8453	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	3210122007	Dawuan	0.8800	0.8500	0.9330	0.8880	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	3210122008	Genteng	0.8740	0.8170	0.9330	0.8750	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	3210122010	Mandapa	0.8570	0.8170	0.9330	0.8690	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	3210122011	Balida	0.9200	0.7000	0.8670	0.8290	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	3210122012	Karanganyar	0.8570	0.6670	0.7330	0.7520	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	3210122013	Salawana	0.7540	0.4170	1.0000	0.7240	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	3210122015	Bojongcideres	0.9090	0.8670	0.9330	0.9030	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	3210122019	Sinarjati	0.8400	0.8170	0.9330	0.8633	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	3210122018	Pasirmalati	0.7770	0.6000	0.8670	0.7480	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321012	DAWUAN	3210122021	Baturuyuk	0.8171	0.7170	1.0000	0.8450	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321013	KADIPATEN	3210132001	Heuleut	0.9543	0.8333	1.0000	0.9459	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321013	KADIPATEN	3210132002	Kadipaten	0.9371	0.9500	0.9333	0.9402	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321013	KADIPATEN	3210132003	Babakananyar	0.8114	0.7333	0.9333	0.8260	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321013	KADIPATEN	3210132004	Karangasambung	0.9029	0.8000	0.9333	0.8787	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321013	KADIPATEN	3210132005	Liangjuliang	0.9371	0.9167	0.9333	0.9290	Mandiri

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321013	KADIPATEN	3210132006	Pagandon	0.9429	0.9000	1.0000	0.9476	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321013	KADIPATEN	3210132007	Cipaku	0.9143	0.8333	0.8667	0.8714	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	3210142001	Pakubeureum	0.8400	0.8000	0.8667	0.8356	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	3210142002	Sukawana	0.8057	0.9833	0.9333	0.9075	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	3210142003	Kertawinangun	0.9886	0.9667	0.8000	0.9184	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	3210142004	Palasah	0.9029	0.8333	1.0000	0.9121	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	3210142005	Babakan	0.8057	0.8667	0.8667	0.8463	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	3210142006	Kertajati	0.9486	0.9500	0.8000	0.8995	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	3210142007	Bantarjati	0.8743	0.8500	0.6000	0.7748	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	3210142008	Pasiripis	0.9200	0.7333	0.9333	0.8622	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	3210142009	Sukamulya	0.8971	0.6667	0.6667	0.7435	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	3210142010	Kertasari	0.8114	0.6833	0.9333	0.8094	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	3210142011	Mekarjaya	0.8914	0.7000	0.8667	0.8194	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	3210142012	Mekarmulya	0.9600	0.8333	0.6667	0.8200	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	3210142013	Sukakarta	0.8800	0.8333	0.9333	0.8822	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321014	KERTAJATI	3210142014	Sahbandar	0.8400	0.6667	0.9333	0.8133	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	3210152001	Biyawak	0.8860	0.7670	0.9333	0.8619	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	3210152002	Panyingkiran	0.9090	0.7330	0.8000	0.8140	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	3210152003	Panongan	0.9310	0.9670	0.9330	0.9438	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	3210152004	Randegan Wetan	0.9429	0.9667	0.6000	0.8365	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	3210152005	Putridalem	0.9029	0.7667	1.0000	0.8898	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	3210152006	Jatitengah	0.9486	0.8167	1.0000	0.9217	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	3210152007	Jatitujuh	0.8571	0.9000	0.9333	0.8968	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	3210152008	Babajurang	0.7886	0.5833	0.8667	0.7462	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	3210152009	Pilangsari	0.9314	0.7667	1.0000	0.8994	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	3210152010	Jatiraga	0.8343	0.7167	0.8667	0.8059	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	3210152011	Sumber Wetan	0.8857	0.7167	0.8667	0.8230	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	3210152012	Pangkalanpari	0.8286	0.6667	0.9333	0.8095	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	3210152013	Randegan Kulon	0.9200	0.9330	0.6000	0.8178	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	3210152014	Sumber Kulon	0.9029	0.6833	0.8667	0.8176	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321015	JATITUJUH	3210152015	Pasindangan	0.9030	1.0000	0.9330	0.9454	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162001	Cibogor	0.8229	0.6000	0.8667	0.7632	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162002	Beber	0.8514	0.7667	1.0000	0.8727	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162003	Beusi	0.8171	0.5833	0.8667	0.7557	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162004	Tegalaren	0.7886	0.6667	0.6667	0.7073	Maju

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162005	Buntu	0.8629	0.7667	0.9333	0.8543	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162006	Ligung	0.8800	0.7167	0.9333	0.8433	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162007	Wanasalam	0.8229	0.6333	0.8000	0.7521	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162008	Ampel	0.8057	0.5500	0.8667	0.7408	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162009	Bantarwaru	0.8343	0.8333	0.9333	0.8670	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162010	Majasari	0.7429	0.8833	0.6667	0.7643	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162011	Kedungkencana	0.7771	0.7333	0.8667	0.7924	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162012	Kertasari	0.8229	0.6167	0.6667	0.7021	Berkembang
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162013	Leuweunghapit	0.8114	0.6333	0.9333	0.7927	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162014	Ligung Lor	0.8229	0.7167	1.0000	0.8465	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162015	Sukawera	0.8686	0.7167	0.6667	0.7506	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162016	Gandawesi	0.9143	0.6833	1.0000	0.8659	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162017	Kodasari	0.7943	0.8000	1.0000	0.8648	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162018	Leuwiliang Baru	0.7943	0.7167	0.6667	0.7259	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321016	LIGUNG	3210162019	Kedungsari	0.8343	0.6333	0.8667	0.7781	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	3210172001	Bongas Wetan	0.8857	0.8500	0.8667	0.8675	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	3210172002	Bongas Kulon	0.8686	0.8833	0.9333	0.8951	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	3210172003	Garawangi	0.8629	0.8000	0.9333	0.8654	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	3210172004	Rancaputat	0.8685	0.8167	0.8667	0.8506	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	3210172005	Banjaran	0.8514	0.7167	0.9333	0.8338	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	3210172006	Sepat	0.8343	0.7833	0.8667	0.8281	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	3210172007	Paningkiran	0.8690	0.8500	0.8670	0.8617	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	3210172008	Parapatan	0.8457	0.7833	0.8000	0.8097	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	3210172009	Panjalın Kidul	0.8914	0.9000	0.8000	0.8638	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	3210172010	Cidenok	0.8571	0.6000	0.6667	0.7079	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	3210172011	Lojikobong	0.8343	0.8833	0.8667	0.8614	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	3210172012	Panjalın Lor	0.8343	0.7500	0.8667	0.8170	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	3210172013	Sumberjaya	0.9200	0.8500	1.0000	0.9233	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	3210172014	Pancaksuji	0.8742	0.6670	0.9333	0.8248	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321017	SUMBERJAYA	3210172015	Gelok Mulya	0.7886	0.7667	0.8000	0.7851	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	3210182001	Cijurey	0.8343	0.7167	1.0000	0.8503	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	3210182002	Pasirmuncang	0.9086	0.7500	1.0000	0.8862	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	3210182003	Jatipamor	0.9257	0.8333	0.9333	0.8975	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	3210182004	Bantrangsana	0.8800	0.7500	0.8666	0.8322	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	3210182005	Jatiserang	0.8860	0.7830	1.0000	0.8897	Mandiri

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	3210182006	Bonang	0.8914	0.6833	0.9333	0.8360	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	3210182007	Leuwiseeng	0.8342	0.7000	0.9333	0.8225	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	3210182008	Panyingkiran	0.9375	0.7000	0.9330	0.8568	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321018	PANYINGKIRAN	3210182009	Karyamukti	0.9600	0.8666	0.9333	0.9200	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321019	PALASAH	3210192001	Majasuka	0.8629	0.7167	0.6667	0.7487	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321019	PALASAH	3210192002	Cisambeng	0.8743	0.8167	0.6667	0.7859	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321019	PALASAH	3210192003	Palasah	0.9486	0.8333	0.6667	0.8162	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321019	PALASAH	3210192004	Weragati	0.8629	1.0000	0.6667	0.8432	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321019	PALASAH	3210192005	Trajaya	0.9257	0.8667	0.6667	0.8197	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321019	PALASAH	3210192006	Tarikolot	0.9486	0.8333	0.6667	0.8162	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321019	PALASAH	3210192007	Buniwangi	0.7714	0.8167	0.6667	0.7516	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321019	PALASAH	3210192008	Sindanghaji	0.9314	0.8500	0.6667	0.8160	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321019	PALASAH	3210192009	Waringin	0.9657	0.8167	0.6667	0.8163	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321019	PALASAH	3210192010	Pasir	0.7940	0.6170	0.8670	0.7592	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321019	PALASAH	3210192011	Karamat	0.8457	0.7333	0.6667	0.7486	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321019	PALASAH	3210192012	Enggalwangi	0.7734	0.6000	0.6667	0.6734	Berkembang
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321019	PALASAH	3210192013	Sindangwasa	0.8514	0.7500	0.6667	0.7560	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321020	CIGASONG	3210202001	Kawunghilir	0.8057	0.8667	0.9333	0.8686	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321020	CIGASONG	3210202002	Tajur	0.8457	0.8000	0.8000	0.8152	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321020	CIGASONG	3210202003	Tenjolayar	0.9143	0.8333	0.8667	0.8714	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321020	CIGASONG	3210202007	Baribis	0.8229	0.7500	0.8667	0.8132	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321020	CIGASONG	3210202008	Batujaya	0.7829	0.5333	0.8667	0.7276	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321020	CIGASONG	3210202009	Kutamanggu	0.9771	0.8501	0.9333	0.9202	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321020	CIGASONG	3210202010	Karayunan	0.9657	0.9333	1.0000	0.9663	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321021	SINDANGWANGI	3210212001	Bantaragung	0.8343	0.8667	0.9333	0.8781	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321021	SINDANGWANGI	3210212002	Padaherang	0.8057	0.7333	0.8667	0.8019	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321021	SINDANGWANGI	3210212003	Lengkong Kulon	0.8514	0.8833	0.8000	0.8449	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321021	SINDANGWANGI	3210212004	Jerukleueut	0.8343	0.8000	0.9333	0.8559	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321021	SINDANGWANGI	3210212005	Sindangwangi	0.9314	0.8333	1.0000	0.9216	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321021	SINDANGWANGI	3210212006	Buahkapas	0.8514	0.8333	0.6667	0.7838	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321021	SINDANGWANGI	3210212007	Ujungberung	0.8629	0.7333	0.7333	0.7765	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321021	SINDANGWANGI	3210212008	Balagedog	0.8629	0.6667	0.6667	0.7321	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321021	SINDANGWANGI	3210212009	Leuwilaja	0.8971	0.7333	0.6667	0.7657	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321021	SINDANGWANGI	3210212010	Lengkong Wetan	0.8229	0.8667	0.6667	0.7854	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	3210222001	Genteng	0.8914	0.6167	0.9333	0.8138	Maju

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	3210222002	Sunia	0.8857	0.6167	0.8667	0.7897	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	3210222003	Darmalarang	0.7714	0.6833	0.9333	0.7960	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	3210222004	Sindangpala	0.8400	0.6667	0.9333	0.8133	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	3210222005	Banjaran	0.8800	0.9000	0.9333	0.9044	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	3210222006	Kagok	0.7543	0.6333	0.8667	0.7514	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	3210222007	Cimeong	0.9086	0.9000	0.9333	0.9140	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	3210222008	Panyindangan	0.8571	0.6167	0.8000	0.7579	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	3210222009	Kareo	0.7314	0.6833	0.8667	0.7605	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	3210222010	Sangiang	0.8860	0.6333	0.9333	0.8175	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	3210222011	Sunia Baru	0.7771	0.6000	0.8667	0.7479	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	3210222012	Hegarmanah	0.8286	0.8333	0.9333	0.8651	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321022	BANJARAN	3210222013	Girimulya	0.8857	0.8000	0.8667	0.8508	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	3210232001	Sedareja	0.8286	0.7167	0.8667	0.8040	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	3210232002	Cidadap	0.7940	0.6500	0.8670	0.7703	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	3210232003	Maniis	0.8171	0.6667	0.6000	0.6946	Berkembang
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	3210232004	Nagarakembang	0.7771	0.8000	0.8667	0.8146	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	3210232005	Wangkelang	0.8514	0.7167	0.9333	0.8338	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	3210232006	Cimanggungirang	0.9086	0.8500	0.6667	0.8084	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	3210232007	Cingambul	0.8971	0.9000	0.8667	0.8879	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	3210232008	Cikondang	0.8971	0.6500	1.0000	0.8490	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	3210232009	Ciranjeng	0.9200	0.9000	1.0000	0.9400	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	3210232010	Rawa	0.8286	0.6667	0.6670	0.7207	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	3210232011	Kondangmekar	0.8400	0.6500	0.9333	0.8078	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	3210232012	Cintaasih	0.8229	0.6167	0.8667	0.7688	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321023	CINGAMBUL	3210232013	Muktisari	0.8400	0.6833	0.9333	0.8189	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	3210242001	Jatisawit	0.8229	0.6502	0.9333	0.8021	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	3210242002	Leuwikidang	0.9543	0.6333	0.9333	0.8403	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	3210242003	Ranji Kulon	0.9143	0.6000	0.9333	0.8159	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	3210242004	Ranji Wetan	0.9029	0.6833	0.8667	0.8176	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	3210242005	Gunungsari	0.9371	0.6833	0.8667	0.8290	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	3210242006	Kasokandel	0.8514	0.7333	0.8667	0.8171	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	3210242007	Girimukti	0.8286	0.6667	0.9333	0.8095	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	3210242008	Jatimulya	0.8400	0.6667	0.8667	0.7911	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	3210242009	Wanajaya	0.8800	0.7167	0.8667	0.8211	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321024	KASOKANDEL	3210242010	Gandasari	0.9429	0.7000	0.8000	0.8143	Maju

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321025	SINDANG	3210252002	Sindang	0.8229	0.7667	0.8000	0.7965	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321025	SINDANG	3210252003	Garawastu	0.7886	0.7000	0.8000	0.7629	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321025	SINDANG	3210252004	Indrakila	0.7486	0.6667	0.8000	0.7384	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321025	SINDANG	3210252005	Gunungkuning	0.8571	0.8000	0.8000	0.8190	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321025	SINDANG	3210252007	Sangkanhurip	0.7314	0.7667	0.8000	0.7660	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321025	SINDANG	3210252008	Bayureja	0.7714	0.6000	0.8000	0.7238	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321026	MAL AUSMA	3210262001	Sukadana	0.7771	0.7000	0.8667	0.7813	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321026	MAL AUSMA	3210262002	Werasari	0.8857	0.8000	0.9333	0.8730	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321026	MAL AUSMA	3210262003	Malausma	0.9486	0.9667	0.9333	0.9495	Mandiri
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321026	MAL AUSMA	3210262004	Lebakwangi	0.8171	0.7167	0.8000	0.7779	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321026	MAL AUSMA	3210262005	Cimuncang	0.8114	0.7667	0.8667	0.8149	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321026	MAL AUSMA	3210262006	Ciranca	0.8571	0.5833	1.0000	0.8135	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321026	MAL AUSMA	3210262007	Banyusari	0.8457	0.6333	0.9333	0.8041	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321026	MAL AUSMA	3210262008	Buninagara	0.8800	0.7000	0.8000	0.7933	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321026	MAL AUSMA	3210262009	Jagamulya	0.8686	0.6500	0.6000	0.7062	Berkembang
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321026	MAL AUSMA	3210262010	Girimukti	0.8057	0.7167	0.8667	0.7963	Maju
32	JAWA BARAT	3210	MAJALENGKA	321026	MAL AUSMA	3210262011	Kramat Jaya	0.8229	0.6333	0.9333	0.7965	Maju

disahkan Tim Verifikasi,



Drs. H. AYAN SUMANTRI, M.Si.
NIP. 196707241986031002



ANDIK SUJARWO, AP., MP.
NIP. 197309181993111001



MAMAT ROHMAN

No.	Status Desa	Jumlah Desa
1	Sangat Tertinggal	0
2	Tertinggal	0
3	Berkembang	6
4	Maju	148
5	Mandiri	176
Jumlah		330

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. MAJALENGKA TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								18.975.089.600,00	18.471.119.860,00	22.243.927.693,00	3.268.838.093,00						25.452.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.975.089.600,00	18.471.119.860,00	22.243.927.693,00	3.268.838.093,00							25.452.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							18.975.089.600,00	18.471.119.860,00	22.243.927.693,00	3.268.838.093,00							25.452.000.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah				BB Nilai	BB Nilai	5.026.879.600,00	5.180.559.460,00	5.694.275.139,00	1.740.120.400,00							6.767.000.000,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselarasn dan Renstra Renja				100 persen	100 persen	79.999.900,00	79.999.900,00	79.999.900,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	DPMD		103.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	14.999.900,00	14.999.900,00	14.999.900,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19 Laporan	19 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian realisasi keuangan perangkat daerah Capaian Realisasi keuangan Perangkat Daerah				0 Persen 100 persen	0 Persen 100 persen	4.183.706.800,00	4.179.737.060,00	4.693.452.739,00	509.745.939,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	DPMD		5.514.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.175.707.000,00	4.171.737.260,00	4.685.452.939,00	509.745.939,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			5.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	4.699.800,00	4.699.800,00	4.699.800,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	DPMD		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	389.424.900,00	337.024.900,00	337.024.900,00	-52.400.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	DPMD		622.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23.785.000,00	23.785.000,00	23.785.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	76.500.000,00	74.100.000,00	74.100.000,00	-2.400.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	84.990.000,00	84.990.000,00	84.990.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.999.900,00	19.999.900,00	19.999.900,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			32.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 persen	100 persen	323.748.000,00	323.748.000,00	323.748.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	DPMD		340.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	184.548.000,00	184.548.000,00	184.548.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	25.000.000,00	235.049.600,00	235.049.600,00	210.049.600,00			-	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	DPMD		138.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	4 Unit	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	25.000.000,00	182.649.600,00	182.649.600,00	157.649.600,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa Sesuai Peraturan				9,39 Persen	9,39 Persen	3.810.000.000,00	3.810.000.000,00	3.810.000.000,00	1.290.000.000,00							5.100.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur dan tata wilayah				9,39 Persen	9,39 Persen	3.810.000.000,00	3.810.000.000,00	3.810.000.000,00	0,00			-	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	Desa se kabupaten majalengka		5.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				5 Desa	5 Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				19 Unit	19 Unit	3.810.000.000,00	3.810.000.000,00	3.810.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			4.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase jumlah RT/RW yang berperan aktif dalam pembangunan				50 Persen	50 Persen	3.150.000.000,00	2.150.000.000,00	3.291.453.315,00	850.000.000,00							4.000.000.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase desa yang memiliki kerjasama				1,82 persen	1,82 persen	3.150.000.000,00	2.150.000.000,00	3.291.453.315,00	141.453.315,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	Desa se kabupaten majalengka		4.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				5 Dokumen	7 Dokumen	3.150.000.000,00	2.150.000.000,00	3.291.453.315,00	141.453.315,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Majalengka, Lemahsugih, Lemahsugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			4.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan				75 Persen	75 Persen	4.888.210.000,00	4.730.560.400,00	4.730.560.400,00	951.790.000,00							5.840.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan aparatur desa dan pengawasan pengelolaan pemerintahan desa				75 persen	75 persen	4.888.210.000,00	4.730.560.400,00	4.730.560.400,00	-157.649.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	Desa se kabupaten majalengka		5.840.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				330 Dokumen	330 Dokumen	148.600.400,00	148.600.400,00	148.600.400,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				330 Dokumen	200 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	165 Dokumen	4.126.710.000,00	4.051.440.000,00	4.051.440.000,00	-75.270.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			4.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				116 Orang	330 Orang	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				330 Dokumen	330 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				330 Dokumen	330 Dokumen	96.999.800,00	0,00	0,00	-96.999.800,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				330 Dokumen	330 Dokumen	70.899.800,00	155.250.000,00	155.250.000,00	84.350.200,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				330 Dokumen	330 Dokumen	150.000.000,00	225.270.000,00	225.270.000,00	75.270.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif				100 Persen	100 Persen	2.100.000.000,00	2.600.000.000,00	4.717.638.839,00	1.645.000.000,00							3.745.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa yang melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat				100 persen	100 persen	2.100.000.000,00	2.600.000.000,00	4.717.638.839,00	2.617.638.839,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	Desa se kabupaten majalengka		3.745.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				26 Dokumen	26 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				26 Lembaga	26 Lembaga	700.000.000,00	1.700.000.000,00	3.196.912.182,00	2.496.912.182,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				26 Laporan	26 Laporan	600.000.000,00	100.000.000,00	420.726.657,00	-179.273.343,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				343 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	900.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 3.Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			J U M L A H						18.975.089.600,00	18.471.119.860,00	22.243.927.693,00	-216.254.416.959,00							25.452.000.000,00	